

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha mikro termasuk dalam bagian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Terbukti disaat krisis ekonomi melanda Indonesia, pemerintah sangat mengandalkan peran UMKM untuk memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi terjadi banyak sektor yang mengalami pertumbuhan pada *output* yang menurun. Setidaknya ada dua faktor yang memainkan peran sangat penting pada saat itu untuk mengurangi efek-efek negatif terhadap kemiskinan. Pertama, pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal banyak menyerap tenaga kerja yang diberhentikan akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari sektor formal dan ternyata memberikan sumber pendapatan tambahan bagi tenaga kerja. Kedua, banyak program pemerintah yang ada untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa program-program pemerintah tersebut adalah Program Nasional bagi Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan, Program Nasional untuk Penguatan Masyarakat (PNPM) yang memberi penekanan pada pengembangan usaha. (Sari, 2013)

Menurut Setiawan (2011), UMKM merupakan kelompok usaha yang beroperasi disektor informal dan padat karya sehingga dinilai mempunyai peran strategis sebagai sumber pencipta lapangan kerja. Peristiwa krisis ekonomi ditahun 1997-1998 berdampak pada besarnya jumlah pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat dari banyaknya perusahaan-perusahaan besar di sektor formal yang mengalami kebangkrutan.

Akibat belum adanya sistem jaminan sosial yang baik terutama sistem pemberi tunjangan pengangguran yang ada dinegara ini, banyak dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan menganggur sehingga menjadi suatu keharusan bagi mereka yang menganggur untuk bekerja di sektor informal maupun membuka usaha sendiri di sektor informal.

Menurut Setyabudi (2007), UMKM dinegara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. UMKM di Indonesia dapat bertahan dimasa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :

- 1) Sebagian UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama, 2) Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, 3) Pada umumnya UMKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan 4) Terbentuknya UMKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

Usaha mikro merupakan sektor penting dalam perekonomian, namun usaha mikro masih menemui banyak permasalahan dalam proses pengembangan usahanya, antara lain kurangnya permodalan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Di samping itu terdapat faktor di luar usaha yang menjadi

kendala seperti minimnya akses pasar, Terbatasnya sarana dan prasarana usaha dan sifat produk dengan *lifetime* pendek. (Sari, 2013)

Kota Gorontalo adalah bagian dari Provinsi Gorontalo yang merupakan pusat pemerintahan daerah. Terdiri dari Sembilan kecamatan yakni Kota Selatan, Hulonthalangi, Dumbo Raya, Kota Timur, Kota Barat, Duingingi, Kota Tengah, Sibatana, Kota Utara. Modernisasi dan Globalisasi di Kota ini mendorong banyak usaha-usaha baru yang bermunculan dari berbagai jenis usaha. Misalnya usaha mikro yang terbagi atas beberapa jenis usaha yakni usaha makanan dan minuman, usaha bahan bangunan, usaha meubel dan pengolahan kayu, usaha anyaman, serta usaha jasa dan lainnya. Gorontalo yang dikenal dengan slogan "Kota Jagung" karena produksi jagung yang berlimpah di Kota ini. Namun banyak belum diketahui oleh masyarakat bahwa Kota Gorontalo juga mempunyai produksi unggulan lain selain jagung. Beberapa produk unggulan lainnya adalah kerajinan karawo dan topi keranjang, berbagai olahan makanan khas Gorontalo, pia saronde, dan lain-lain. Namun, menjamurnya usahaini tidak luput dari kendala. Kendala utama yang sering di hadapi oleh pengusaha mikro adalah permodalan selain permasalahan dari segi pemasaran, sumber daya manusia, bahan baku, dan keterbatasan teknologi.

Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan Sari (2013) dengan mengatakan bahwa permodalan merupakan salah satu faktor utama untuk pengembangan usaha. Minimnya permodalan bagi usaha mikro dikarenakan pada umumnya usaha mikro merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup dan hanya mengandalkan modal dari pemilik usaha itu sendiri yang dimana jumlahnya pun terbatas, sedangkan untuk

meminjam modal kerja dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis dinilai berat.

Menurut Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Gorontalo jumlah Usaha mikro di Kota Gorontalo tahun 2015 :

**Gambar 1.1 Jumlah Usaha Mikro yang ada di Kota Gorontalo tahun 2015**

Sumber : Disperindag-Kop Kota Gorontalo 2016

Solusi yang diberikan oleh Dinas Pemerintahan maupun Instansi yang terkait dengan usaha mikro adalah dengan memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha melalui bank. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi yaitu mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi salah satunya dalam bentuk pengkreditan bagi masyarakat perseorangan maupun usaha, kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha masyarakat, salah satu fasilitas kredit yang disalurkan oleh bank yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Wardhani, 2010).

Menurut Bank Indonesia Pengertian dan Tujuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada usaha UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas peminjaman untuk usaha produktif. Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan menyatakan sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya, harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga

keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR, dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) pada tahun 2016 ini mengalokasikan dana KUR sebesar Rp. 66 triliun. Deputi pembiayaan KUKM, Braman Setyo mengatakan bahwa ada enam lembaga penyalur KUR yaitu BRI, Mandiri, BNI, BPD, Bank Umum Lain, dan Lembaga Keuangan Non Bank. Berikut ini adalah rincian alokasi KUR 2016 :

**Tabel 1.1 Daftar Bank Penyalur KUR dan jumlah alokasi dana tahun 2016**

No.	Bank Penyalur	Jumlah Alokasi Dana
1	BRI	Rp. 61 T
2	Bank Mandiri	Rp. 1 T
3	BNI	Rp. 500 M
4	BPD	Rp. 1,5 T
5	Bank Umum lain	Rp. 1,5 T
6	LKNB	Rp. 500 M

Sumber : viva.co.id

Dilihat dari tabel diatas jumlah bank penyalur yang ada di Kota Gorontalo sendiri yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Umum lain seperti Bank Sulut. Bank BRI merupakan bank penyalur dengan alokasi dana terbanyak yakni sebesar Rp 61 Triliun. Fokus penelitian dilakukan di BRI Unit Kota Barat sebab unit ini merupakan salah satu unit yang tergolong lancar dalam pemberian KUR hal ini ditandai dengan BRI unit Kota Barat berada diposisi kedua dalam realisasi KUR. Berikut adalah jumlah realisasi KUR 5 tahun terakhir di BRI Unit Kota Barat :

**Tabel 1.2 Jumlah Realisasi KUR di BRI Unit Kota Barat tahun 2012 s/d 2016**

No	Tahun	Jumlah Realiasi (Rp)
1	2012	3.627.000.000

2	2013	5.248.000.000
3	2014	6.520.000.000
4	2015	6.715.000.000
5	2016	6.520.000.000

Sumber : BRI Unit Kota Barat

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya minat pengusaha mikro untuk melakukan pendanaan melalui bank
2. Kurangnya modal bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Kota Barat dengan melihat aspek modal?
2. Bagaimana perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Kota Barat dengan melihat aspek produksi?
3. Bagaimana perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Kota Barat dengan melihat aspek omzet penjualan?
4. Bagaimana perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Kota Barat dengan melihat aspek keuntungan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Kota Barat dengan melihat aspek modal
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Kota Barat dengan melihat aspek produksi
3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Kota Barat dengan melihat aspek omzet penjualan
4. Untuk mengetahui perbedaan kinerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh bantuan KUR dari BRI Unit Kota Barat dengan melihat aspek keuntungan

#### 1.5 **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya

akuntansi keuangan dan perbankan. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pemberian pinjaman modal usaha bagi badan yang bersangkutan atau instansi lainnya. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi masukan kepada pemerintah Kota Gorontalo terkait dengan pembinaan usaha mikro dilingkungan pemerintah Kota Gorontalo.